

ABSTRAK

ALEXSANDER MANIHURUK

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia, tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memberikan kesempatan bermain judi terhadap orang lain, Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Para Terdakwa juga dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sehingga telah terpenuhi Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana perjudian di dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 426 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f. Pertimbangan hukum hakim atas tindakan memberi kesempatan orang lain melakukan perjudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024 Para Terdakwa bukan pemilik permainan judi, melainkan hanya para pekerja yang mencari uang untuk membiayai keluarganya. Berdasarkan alasan tersebut, pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Mengenai pidana menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Perjudian

ABSTRACT

ALEXSANDER MANIHURUK

Criminal acts are social phenomena that occur on earth and may never end in line with the development and social dynamics that occur in society.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Legal regulations for gambling crimes in Indonesia, gambling crimes according to Article 303 and Article 303 bis Criminal liability for people who provide opportunities to gamble to others, Meanwhile, the division of types of gambling according to the Criminal Code, the crime of offering or providing opportunities to gamble, Offering opportunities here means that the creator does anything to invite or invite people to gamble, by providing a certain place or time. In the Criminal Code there are two articles that regulate gambling, namely Article 303 and Article 303 bis. The Defendants were also blamed for their actions in committing the crime of "Without the right to intentionally provide an opportunity for the general public to gamble", so that Article 303 Paragraph (1) 2 of the Criminal Code has been fulfilled.

It is concluded that the legal provisions for gambling crimes in the National Criminal Code are regulated in Article 426 (1) Punishable by a maximum imprisonment of 9 (nine) years or a maximum fine of category VI (2) If the Criminal Act as referred to in paragraph (1) is committed in carrying out a profession, additional penalties may be imposed in the form of revocation of rights as referred to in Article 86 letter f. The judge's legal considerations for the act of providing an opportunity for others to gamble in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 360 K / Pid / 2024 The Defendants are not the owners of gambling games, but are only workers who are looking for money to support their families. Based on these reasons, the prison sentence imposed by the *judex facti* must be reduced as stated in the verdict, so the cassation application is declared rejected with revisions. Regarding the criminal penalty, each is sentenced to 1 (one) year in prison

Keywords: Accountability, Criminal Acts, Gambling